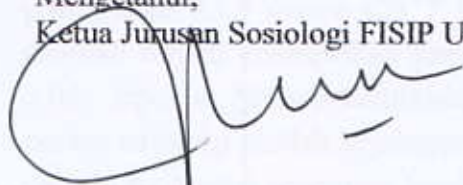


LEMBAR IDENTITAS LAPORAN PENELITIAN

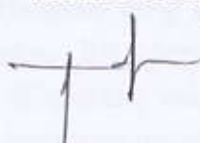
1. Judul : Analisis Trend Kejahatan Dalam Statistik Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2010-2015
2. Bidang Pengabdian : Sosial
3. Ketua Tim Peng
 - a. Nama Lengkap : Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/NIDN : 19850530 200812 1 002/0030058501
 - d. Disiplin Ilmu : Sosiologi/Kriminologi
 - e. Pangkat/Golongan : III/c
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : ISIP/Sosiologi
 - h. Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1
Gedong Meneng, Bandar Lampung.
 - i. HP/Email : 08151676721/teuku.fahmi@gmail.com
4. Jumlah Tim : 3 orang; 1. Drs. Susetyo, M.Si.
2. Drs. Ikram, M.Si.
3. Drs. Bintang Wirawan, M.Hum
5. Lokasi Kegiatan : Provinsi Lampung
6. Biaya Kegiatan : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unila



Drs. Ikram, M.Si.
NIP 19610602 198902 1 001

Bandar Lampung, Agustus 2018
Ketua Peneliti,



Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
NIP 19850530 200812 1 002

Ketua LPPM Universitas Lampung

Menyetujui,

a.n. Dekan FISIP Unila
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kerja Sama



Warsono, Ph.D.
NIP 19630216 198703 1 003



Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

LAPORAN PENELITIAN



**ANALISIS TREND KEJAHATAN DALAM STATISTIK KEPOLISIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN 2010-2015**

Ketua Pelaksana:

Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. (Ketua)
Drs. Susetyo, M.Si. (Anggota)
Drs. Ikram, M.Si. (Anggota)
Drs. Bintang Wirawan, M.Hum. (Anggota)

Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung
Dengan Nomor Kontrak: 315/UN26.16/KU.02.00.01/2018

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018

LEMBAR IDENTITAS LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : Analisis Trend Kejahatan Dalam Statistik Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2010-2015
2. Bidang Pengabdian : Sosial
3. Ketua Tim Peng
 - a. Nama Lengkap : Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/NIDN : 19850530 200812 1 002/0030058501
 - d. Disiplin Ilmu : Sosiologi/Kriminologi
 - e. Pangkat/Golongan : III/c
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : ISIP/Sosiologi
 - h. Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1
Gedong Meneng, Bandar Lampung.
 - i. HP/Email : 08151676721/teuku.fahmi@gmail.com
4. Jumlah Tim : 3 orang; 1. Drs. Susetyo, M.Si.
2. Drs. Ikram, M.Si.
3. Drs. Bintang Wirawan, M.Hum
5. Lokasi Kegiatan : Provinsi Lampung
6. Biaya Kegiatan : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Unila

Bandar Lampung, Agustus 2018
Ketua Peneliti,

Drs. Ikram, M.Si.
NIP 19610602 198902 1 001

Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
NIP 19850530 200812 1 002

Ketua LPPM Universitas Lampung

Menyetujui,
a.n. Dekan FISIP Unila
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kerja Sama

Warsono, Ph.D.
NIP 19630216 198703 1 003

Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan trend kejahatan dalam data statistik kriminal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung tahun 2010-2015. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dan faktor demografi di wilayah hukum kepolisian Kepolisian Daerah Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup: (1) data statistik kriminal resmi tahun 2010-2015 yang bersumber dari Kepolisian Daerah Lampung, khususnya Puskodal Ops dan Reskrim, dan (2) data tentang perkembangan demografi, terutama tentang jumlah pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2010-2015 yang berasal dari Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung. Hasil analisis penelitian menunjukkan (1) Secara keseluruhan total *crime rate* tahun 2010-2015 di wilayah Provinsi Lampung mengalami fluktuasi naik dan turun. Nilai puncak total *crime rate* berada di tahun 2014, yakni sebesar 24,2. Kemudian disusul di tahun 2015 (23,3) dan di tahun 2010 (22,2); (2) Total jumlah kejahatan yang dilaporkan pada Polresta Bandar Lampung di tahun 2010 (untuk sepuluh jenis kejahatan) ada sebanyak 1.799 laporan. Terjadi penurunan pada tahun 2011 sebesar 1,6 persen (1.770 laporan) dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2014 terjadi peningkatan 13,9 persen (2017 laporan) dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 kembali terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan yakni sebanyak 2.051 laporan. Namun demikian, di tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 4,2 persen terhadap jumlah kejahatan yang dilaporkan yakni sebanyak 1.963 laporan, dan (3) Kejahatan pencurian kendaraan bermotor memiliki *crime rate* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya.

Kata Kunci: *Crime rate, demografi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penelitian beserta laporannya dapat terselesaikan. Adapun kegiatan penelitian yang kami laksanakan berjudul “*Analisis Trend Kejahatan dalam Statistik Kepolisian (di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2010-2015)*”.

Kami mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Lampung atas terselenggaranya kegiatan penelitian ini, terutama kepada Bapak Rektor, Ketua Lembaga Penelitian, dan juga Bapak Dekan FISIP. Lebih lanjut, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Kepolisian Daerah Lampung yang telah memberikan bantuan banyak hal terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penelitian ini.

Terkahir, kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan, namun harapan Kami semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Pertanyaan Penelitian	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Signifikansi Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Koseptual	5
2.1.1. Tinjauan tentang Statistik Kriminal	5
2.1.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk serta Hubungannya dengan Trend Kejahatan	6
2.2. Kerangka Pemikiran	7

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	8
3.2. Pendekatan Penelitian	8
3.3. Ruang Lingkup Penelitian	8
3.4. Teknik Pengumpulan Data	9
3.5. Analisis Data	9
3.6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	10

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Provinsi Lampung	11
B. Kependudukan Provinsi Lampung	13
C. Kondisi Pemerintahan Provinsi Lampung	16

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Trend Kejahatan dalam Statistik Kriminal Resmi Kepolisian Daerah Lampung pada Tahun 2010-2015	20
5.2. Pembahasan	30
5.2.1. Analisis Pertumbuhan Jumlah Penduduk serta Hubungannya dengan Trend Kejahatan	30

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	40
6.2. Saran	41

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dominasi pemberitaan media massa belakangan ini menggambarkan bahwa angka terjadinya tindak kejahatan di Indonesia secara kuantitas semakin menunjukkan penambahan, baik kejahatan kekerasan (*violence*) maupun kejahatan tanpa kekerasan (*non-violence*). Namun demikian, tidak kesemua peristiwa kriminalitas tersebut dapat tercatat dalam statistik kriminal yang dibuat oleh pranata resmi dalam peradilan pidana, khusus dalam hal ini adalah kepolisian. Beberapa peristiwa kriminalitas yang dicatat oleh polisi adalah terbatas pada peristiwa kriminalitas yang diketahui saja oleh polisi. Data kriminalitas yang tidak diketahui oleh polisi ini disebut sebagai angka gelap (*dark number*) kejahatan.

Dalam kaitan tersebut, analisa tingkat, pola, dan trend kriminalitas yang lazim dilakukan dalam kriminologi (sebagai sosiologi praktis) tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data statistik kriminal yang dikumpulkan dan disusun oleh pranata penegak hukum, terutama kepolisian (Mustofa, 2007). Namun demikian, terdapat pro dan kontra di kalangan kriminolog tentang validitas dan reliabilitas dari pemanfaatan data sekunder kriminalitas tersebut.

Dalam hal ini, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penggunaan statistik kriminal agar tidak menyesatkan, diantaranya: (1) menghindari pernyataan total kejahatan sebagai tolok ukur tingkat kriminalitas; (2) dalam mengukur kriminalitas akan lebih baik dikelompokkan menurut klasifikasi kejahatan yang masing-masing klasifikasi mempunyai kesamaan ciri; (3) fluktuasi kejahatan harus diperhitungkan dengan fluktuasi populasi penduduk (*crime rate*), dan; (4) dalam mengukur fluktuasi kejahatan “polisi” sering

mempergunakan “angka indeks kejahatan” dan angka indeks kejahatan inilah yang digunakan sebagai tolok ukur fluktuasi kejahatan (Mustofa, 2007).

Lebih lanjut, Mustofa (2007) juga mengemukakan banyak analisa pola kriminalitas yang dilakukan dengan mempergunakan data statistik criminal tersebut. Penelitian kriminologis yang berdimensi sosiologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mannheim (1973), pada awalnya sudah memanfaatkan data statistik criminal, misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Andre Guerry (1829) dan Adolpe Quetelet (1853).

Sebagai sebuah statistik kriminal yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat seriusitas kejahatan, maka seharusnya pihak kepolisian dalam membuat statistik kriminal tersebut memperhatikan dan mencermati adanya trend kejahatan yang fluktuasi naik-turun tersebut. Hal itu sangat diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan apa yang perlu mendapat perhatian dan keseriusan dalam melakukan usaha preventif atau persuasif, paling tidak untuk dapat menekan lajunya kenaikan angka kejahatan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasar pada paparan latar belakang di atas, menarik untuk dicermati statistik kriminal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2010-2015. Sebagai ikon Serambi Sumatera, Provinsi Lampung memegang berbagai peranan penting dalam membangun Pulau Sumatera secara keseluruhan; baik dari aspek pemerintahan, ekonomi bahkan sosial budaya. Oleh karenanya, terciptanya rasa aman dan kondusif di Provinsi Lampung telah menjadi sebuah kemestian.

Bila diamati sekilas, data kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini, terdapat 10 jenis kejahatan yang secara intensitas frekuensinya menunjukkan fluktuasi naik dan turun. Sebagai sebuah statistik kriminal yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat keseriusan sebuah kejahatan, maka sudah menjadi kemestian pihak kepolisian dalam membuat statistik kriminal tersebut memperhatikan dan mencermati adanya trend kejahatan tersebut. Langkah

tersebut sangat diperlukan guna mengetahui bentuk-bentuk kejahatan apa yang perlu mendapat perhatian dan keseriusan dalam melakukan usaha preventif atau persuasif, paling tidak untuk dapat menekan lajunya kenaikan angka kejahatan tersebut.

Tabel 1.1.
Jenis Kasus Laporan Kejahatan Berdasarkan Tahun Kejadian (2010-2015)
di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung

No	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pembunuhan	7	3	3	2	13	28
2	Penganiayaan Berat	142	107	94	91	99	533
3	Pencurian Berat	482	486	625	694	631	2918
4	Pencurian Keras	78	104	125	174	110	591
5	Pencurian Ranmor	579	522	586	582	443	2712
6	Kej. Ketertiban Umum	83	104	95	80	112	474
7	Perjudian	62	169	122	55	43	451
8	Pemerasan/Rampas	59	9	114	20	8	210
9	Perkosaan	30	22	15	16	18	101
10	Penipuan	277	244	238	337	486	1582
Jumlah		1799	1770	2017	2051	1963	9600

Sumber: Format GK 56 Jenis Kasus Tahun 2010-2015 Reskrim Polda Lampung dan Jajaran, 2015

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti ingin merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian: "Bagaimana trend kejahatan dalam statistik resmi kepolisian dengan faktor demografi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung tahun 2010-2015?"

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan trend kejahatan dalam data statistik kriminal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung tahun 2010-2015. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dan faktor demografi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Signifikansi teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur dan khasanah pengetahuan mengenai penggunaan data statistik kriminal dalam mengetahui trend kejahatan pada suatu wilayah hukum kepolisian. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai sumber maupun penelitian mengenai data statistik kriminal untuk konteks Indonesia masih belum banyak ditemukan sehingga dibutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai masalah ini.

2. Signifikansi Metodologis

Secara Metodologis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi proses penelitian selanjutnya. Adapun hasil temuan kuantitatif dalam penelitian ini dapat menjadi masukan yang berarti bagi penelitian kualitatif nantinya dalam melihat gejala yang sama di Provinsi Lampung.

3. Signifikansi Praktis

Adapun signifikansi praktisnya adalah penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pihak Kepolisian Daerah Lampung, pemerintah provinsi, kota dan daerah, serta dinas-dinas terkait, dalam menciptakan rasa aman di Provinsi Lampung.

BAB 2. **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Kerangka Koseptual

2.1.1. Tinjauan tentang Statistik Kriminal

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian (Mustofa, 2007). Lebih lanjut, Mustofa (2007) mengemukakan bahwa statistik kriminal dengan pengertian yang di atas merupakan statistik deskriptif, karena memang data tersebut merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Walker (1971) yang membagi statistik kriminal kedalam dua bagian, yaitu statistik yang disusun secara berkala (*routinely collected*) dan statistik yang disusun secara khusus (*specially collected*). Pada umumnya untuk jenis pertama dikenal dengan statistik kriminal resmi dan untuk jenis kedua dikenal dengan statistik kriminal tidak resmi. Statistik resmi dibuat berdasarkan pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dan standar administratif oleh agen-agen yang mengontrol peraturan itu. Statistik kriminal resmi merupakan dasar dalam pencatatan bagi semua agen yang termasuk pencatatan resmi terhadap tingkah laku kriminal dan kriminalitas. Sedangkan statistik kriminal tidak resmi diperoleh secara bebas dari catatan pengontrol kejahatan, baik berasal dari pencatatan pribadi, agen-agen investigasi, hasil penelitian dan observasi.

2.1.2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk serta Hubungannya dengan Trend Kejahatan

Kriminalitas atau kejahatan dapat timbul karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Demikian penjelasan Donald R. Cressey. Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu bahwa terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial tempat kejahatan tersebut terjadi (Abdulsyani, 1987). Tinggi-rendahnya angka kejahatan mempunyai hubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial; artinya kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat, yaitu antara lain:

1. Mobilitas penduduk,
2. Persaingan dan pertentangan kebudayaan,
3. Ideologi politik,
4. Ekonomi,
5. Kuantitas penduduk,
6. Agama, dan
7. Pendapatan dan pekerjaan.

Dalam mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang lampau, Wilkins memberikan sebuah contoh yang sangat baik tentang cara menganalisa variabel-variabel yang telah lampau tersebut (Walker, 1971). Dia mengemukakan sebuah teknik untuk mengukur asosiasi antara dua variabel. Teknik yang digunakan tersebut adalah berupa grafik dengan membagi dua variabel mendekati skala waktu yang sama. Namun yang menjadi kendalanya dalam metode ini adalah terkadang angka-angka dari satu variabel tidak sama. Ada yang sangat banyak sementara lainnya sedikit.

Lebih lanjut, Wilkins mengemukakan teknik lainnya: yaitu dengan menghitung rata-rata setiap variabel, serta mengemukakan nilai-nilai tiap tahunnya sebagai presentase dari rata-rata itu. Metode Wilkins inilah yang

kemudian akan disajikan dalam menggambarkan trend kejahatan di Provinsi Lampung, dengan memperhatikan faktor demografi.

Peningkatan trend kejahatan, tidak bisa dipisahkan dengan faktor peningkatan jumlah penduduk, hal ini terjadi karena semakin bertambah jumlah penduduk, maka akan semakin keras persaingan diantara masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika diamati, semakin bertambah penduduk, maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan akan semakin ketat.

2.2. Kerangka Pemikiran

Trend adalah pertumbuhan gradual atau penurunan kuantitas secara gradual selama periode yang lama dalam hubungannya dengan rangkaian waktu (Reading, 1986). Dalam penelitian ini, trend kejahatan diarahkan kepada kecenderungan pertumbuhan dan penurunan angka kejahatan yang didasari pada pertumbuhan dan penurunan angka kejahatan yang didasari pada data statistik kriminal resmi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung tahun 2010-2015.

Untuk mengukur trend kejahatan digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Larry Siegel (2008), yaitu dengan mengetahui angka perimbangan kejahatan atau *Crime rate*, yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau nilai rata-rata kejahatan per 10.000 penduduk.

$$Crime Rate = \frac{Angka\ kejahatan\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ total\ penduduk} \times 10.000$$

Lebih lanjut, juga akan dilakukan analisis untuk melihat hubungan antara trend kejahatan dengan faktor demografi wilayah Provinsi Lampung. Dalam hal ini, faktor demografi yang dimaksud ditekankan pada variabel jumlah populasi penduduk di tahun tersebut, yakni angka pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Lampung dalam jangka waktu tahun 2010-2015.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, mendalam dan lengkap, maka tipe penelitian yang sangat memungkinkan untuk mendukung hal tersebut di atas adalah tipe penelitian deskriptif. Penggunaan tipe penelitian deskriptif ini, juga diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan trend kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Lampung Tahun 2010-2015. Selain itu juga mendeskripsikan tentang pengaruh faktor demografi (penduduk) terhadap trend kejahatan di Provinsi Lampung.

3.2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan penelitian ini menyangkut statistik, yakni statistik kriminal kepolisian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Berdasarkan data sekunder berupa dokumen kepolisian, data tersebutlah yang akan digunakan sebagai bahan dan pedoman untuk analisa secara deskriptif.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian, maka penelitian ini membatasi diri dengan lingkup penelitian yang hanya meliputi; untuk mengetahui dan menjelaskan trend kejahatan dalam data statistik kriminal di wilayah hukum kepolisian Kepolisian Daerah (Polda) Lampung Tahun 2010-2015 serta dikaitkan dengan faktor demografi di Provinsi Lampung.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa tahap dalam proses pengumpulan data, diantaranya: pertama, mengumpulkan data tentang trend kejahatan di Polda Lampung, yakni data tentang statistik resmi tahun 2010-2015 yang bersumber dari Polda Lampung, khususnya Puskodal Ops dan Reskrim, yaitu bagian dari Polda Lampung khusus mengurus masalah data statistik kriminal resmi kepolisian. Kedua, mengumpulkan data tentang perkembangan demografi, terutama tentang jumlah pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung. Data demografi Provinsi Lampung tahun 2010-2015 berasal dari Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung, yakni dokumen Lampung dalam Angka.

3.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, metode Larry J. Siegel (2008) untuk mengetahui crime rate atau angka perimbangan kejahatan. Analisis data dengan metode Siegel dilakukan melalui visualisasi tabel. Adapun metode kedua, menggunakan analisis metode Wilkins yang dilakukan melalui visualisasi grafik. Menurut metode Siegel, crime rate dapat dihitung dengan cara berikut: total angka kejahatan yang dilaporkan dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan per10.000, sebagaimana rumus berikut:

$$Crime Rate = \frac{Angka\ kejahatan\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ total\ penduduk} \times 10.000$$

Sementara untuk mengetahui trend perkembangan jumlah penduduk dan trend kejahatan yang dilaporkan, digunakan metode Wilkins. Nantinya, peneliti berusaha melihat ada/tidaknya hubungan antara variabel perkembangan jumlah penduduk dengan naik/turunnya jumlah dari jenis kejahatan tertentu yang dilapor dalam rentang lima tahun.

3.6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 26 (duapuluh enam) minggu. Adapun rincian pelaksanaan waktu penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kegiatan	Minggu ke-											
		2	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
1.	Tahap Persiapan												
1.1.	Identifikasi Masalah atau Peluang	■											
1.2.	Studi Pendahuluan		■										
2.	Tahap Pelaksanaan												
2.1.	Pengumpulan Data			■	■								
2.2.	<i>Quality Control</i>					■							
3.	Tahap Pelaporan												
3.1.	Interpretasi Kuantitatif								■	■			
3.2.	Laporan penelitian										■	■	■

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini¹.

Berdasarkan administrasi wilayah, Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 14 Kabupaten/Kota, 214 wilayah Kecamatan, dan 2.463 desa/kelurahan. Wilayah yang memiliki luas terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 4.950,40 Km², Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 4.789,82 Km².

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung

No	Kabupaten / Kota	Luas KM2
1	Lampung Barat	4.950.40
2	Tanggamus	2.731.61
3	Lampung Selatan	2.007.01
4	Lampung Timur	4.337.89
5	Lampung Tengah	4.789.82
6	Lampung Utara	2.725.63
7	Way Kanan	3.921.63
8	Tulang Bawang	4.385.84
9	Pesawaran	1.173.77
10	Pringsewu	625.00
11	Mesuji	2.184.00
12	Tulang Bawang Barat	1.201.00
13	Bandar Lampung	192.96
14	Metro	61.79
	Lampung	35.288.35

Sumber : BPS Lampung Dalam Angka 2014

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan² : (a) Timur - Barat berada antara 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur , (b) Utara - Selatan berada antara 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan Kontur geografi daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi oleh : (a) Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di Sebelah Utara, (b) Selat Sunda di Sebelah Selatan, (c) Laut Jawa di Sebelah Timur, (d) Samudra Indonesia di Sebelah Barat.

Propinsi Lampung merupakan wilayah daratan dengan topografi wilayah yang berupa pegunungan dan berbukit-bukit, yang berada pada ketinggian 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki perairan umum berupa sungai dan danau. Iklim daerah Lampung termasuk tropis basah, dengan curah hujan beragam antara 1.297-2.660 milimeter setiap tahun. Suhu udara beragam antara 20°Celsius-34°Celsius. Wilayah Lampung mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana, yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan banjir.³

Lahan di Propinsi Lampung sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, sumber daya alam lainnya yang dimiliki adalah perikanan laut, kehutanan, dan pertambangan yang potensial untuk dikembangkan. Propinsi Lampung memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Lampung terdiri atas berbagai suku, antara lain Lampung, Rawas, Melayu, Pasemah, Semendo. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (95,41 persen), selebihnya beragama Kristen (2,2 persen), Budha (0,4 persen), serta lainnya (2,0 persen).⁴

B. Kependudukan Provinsi Lampung

Penduduk Provinsi Lampung pada Sensus Penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 masing-masing sebesar 1.667.511 jiwa, 2.775.695 jiwa, 4.624.785 jiwa, 6.015.803 jiwa, 6.659.869 jiwa, dan 7.608.405 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 adalah sebesar 5,77 % pertahun dan mengalami penurunan pada periode 1980-1990

menjadi sebesar 2,67 % pertahun. Sedangkan periode 1990-2000 sebesar 1,01 % Apabila dilihat laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya baik pada periode 1971-1980 maupun periode 1980-1990. Penduduk Provinsi Lampung tahun 2000 sebesar 6.659.869 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 189 orang per km² tahun 2000 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 74 orang per km², Kabupaten Tanggamus 239 orang per km², Kabupaten Lampung Selatan 356 orang per km², Kabupaten Lampung Timur 200 orang per km², Kabupaten Lampung Tengah 218 orang per km², Kabupaten Lampung Utara 195 orang per km², Kabupaten Way Kanan 91 orang per km², Kabupaten Tulang Bawang 112 orang per km², dan Kota Bandar Lampung 3.851 orang per km², dan Kota Metro 1.917 orang per km².

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP 2010) Penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 sebesar 7.608.405 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 216 orang per km² tahun 2010 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 85 orang per km², Kabupaten Tanggamus 196 orang per km², Kabupaten Lampung Selatan 455 orang per km², Kabupaten Lampung Timur 219 orang per km², Kabupaten Lampung Tengah 244 orang per km², Kabupaten Lampung Utara 214 orang per km², Kabupaten Way Kanan 104 orang per km², Kabupaten Tulangbawang 91 orang per km², Kabupaten Pringsewu 585 orang per km², Kabupaten Tulang Bawang Barat 209 orang per km², Kabupaten Mesuji 86 orang per km², Kota Bandar Lampung 4.570 orang per km², dan Kota Metro 2.354 orang per km².

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2013⁵

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Kab. Lampung Barat	227.245	200.528	427.773	113,32
2.	Kab. Tanggamus	287.176	261.552	548.728	109,80
3.	Kab. Lampung Selatan	480.641	451.911	932.552	106,36
4.	Kab. Lampung Timur	497.071	470.933	968.004	105,55
5.	Kab. Lampung Tengah	609.888	583.070	1.192.958	104,60
6.	Kab. Lampung Utara	303.417	291.145	594.562	104,22
7.	Kab. Way Kanan	214.672	200.406	415.078	107,12
8.	Kab. Tulang Bawang	213.474	197.251	410.725	108,22
9.	Kab. Pesawaran	210.683	196.792	407.475	107,06
10.	Kab. Pringsewu	190.444	179.713	370.157	105,97
11.	Kab. Mesuji	100.402	90.819	191.221	110,55
12.	Kab. Tulang Bawang Barat	131.710	124.123	255.833	106,11
13.	Kota Bandar Lampung	456.620	446.265	902.885	102,32
14.	Kota Metro	74.980	74.381	149.361	100,81
TOTAL		3.998.423	3.768.889	7.767.312	106,09

Sumber : Data Base BPS Lampung 2014

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Berdasarkan hasil Estimasi penduduk, penduduk Provinsi Lampung, 2012 mencapai 7.767. 312 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,09. Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tampak masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Dibandingkan dengan kabupaten, kepadatan penduduk di kota umumnya sangat tinggi. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung misalnya mencapai 4.679 jiwa per km²

dan Kota Metro mencapai 2.417 jiwa per km². Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten masih berada dibawah 600 jiwa per km², bahkan Kabupaten Lampung Barat baru mencapai 86 jiwa per km². Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin. Penyajian data ketenagakerjaan, BPS menggunakan batasan umur 15 tahun ke atas dari semua penduduk dan dikenal dengan istilah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja di Provinsi Lampung, 2012 berjumlah 5.489.582 jiwa yang terdiri dari jumlah angkatan kerja 3.637.897 jiwa dan bukan angkatan kerja 1.851.685 jiwa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (3.449.307 jiwa) dan pengangguran (188.590 jiwa).

Penduduk Provinsi Lampung sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu 49,26 persen atau 1.666.372 jiwa. Adapun penduduk yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan tercatat 12,60 persen atau 448.242 jiwa. Berdasarkan dari jumlah tersebut, 8.382 orang di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja terus dilakukan, salah satunya melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan UMP Provinsi Lampung, 2013 adalah Rp. 1.150.000,00 per bulan.

C. Kondisi Pemerintahan Provinsi Lampung

Sejak berlakunya undang-undang otonomi daerah dan mulai berlakunya pemekaran daerah, tahun 1997 wilayah Provinsi Lampung dimekarkan menjadi 7 kabupaten/kota, kemudian dengan diundangkannya UU No. 12

Tahun 1999 dimekarkan lagi menjadi 10 kabupaten/kota. Berdasarkan UU RI No. 33 Tahun 2008 terbentuklah Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Jadi dengan demikian Provinsi Lampung terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Tahun 2010 berubah menjadi 12 Kabupaten dan 2 kota. Adanya pemekaran Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2012, menjadikan Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota. Tahun 2012 wilayah administrasi desa/kelurahan di Provinsi Lampung mengalami penambahan menjadi 2.576 desa/kelurahan, dimana tahun 2011 berjumlah 2.511 desa/kelurahan.

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan dengan perincian tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Jumlah Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah
Kelurahan/Desa di Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung 2012⁶

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Kab. Lampung Barat	Liwa	15	136
2.	Kab. Tanggamus	Kota Agung	20	302
3.	Kab. Lampung Selatan	Kalianda	17	251
4.	Kab. Lampung Timur	Sukadana	24	264
5.	Kab. Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	307
6.	Kab. Lampung Utara	Kotabumi	23	247
7.	Kab. Way Kanan	Blambangan Umpu	14	222
8.	Kab. Tulang Bawang	Menggala	15	151
9.	Kab. Pesawaran	Gedong Tataan	9	144
10.	Kab. Pringsewu	Pringsewu	9	131
11.	Kab. Mesuji	Mesuji	7	75
12.	Kab. Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya	8	80
13.	Kab. Pesisir Barat	Krui	11	118
14.	Kota Bandar Lampung	Bd. Lampung	20	126
15.	Kota Metro	Metro	5	22
TOTAL			225	2.576

Sumber : BPS Lampung 2014

Sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat ini telah dijabat oleh 9 (sembilan) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berturut-turut sebagai berikut : (i) Kusno Danupoyo menjabat dari tahun 1964 – 1966, (ii) Zainal Abidin Pagaralam dari tahun 1966 – 1973, (iii) R. Sutiyoso dari tahun 1973-1978, (iv) Yasir Hadibroto dari tahun 1978 – 1988, (v) Poedjono Pranyoto dari tahun 1988 – 1998, (vi) oemarsono dari tahun 1998 – 2003, (vii) Tursandi Alwi dari tahun 2003 – 2004, (viii) Sjachroedin Z.P dari tahun 2003 – 2008, (ix) Syamsurya Ryacudu dari tahun 2008 – 2009 dan Sjachroedin Z.P dari tahun 2009 – 2014⁷.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa tingkat, pola, dan trend kriminalitas yang lazim dilakukan dalam kriminologi tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data statistik kriminal yang dikumpulkan dan disusun oleh pranata penegak hukum, terutama kepolisian (Mustofa, 2011). Namun demikian, terdapat pro dan kontra di kalangan kriminolog tentang validitas dan reliabilitas dari pemanfaatan data sekunder kriminalitas tersebut.

Perlu diketahui bahwa data statistik kriminal menurut kepolisian tidak dapat mewakili jumlah kejahatan yang ada secara keseluruhan. Tidak semua peristiwa kejahatan dicatat oleh polisi. Peristiwa kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak tidak pernah tercatat dalam statistik kriminal polisi. Data kriminalitas yang tidak diketahui oleh polisi ini disebut sebagai angka gelap (*dark number*) kejahatan (Mustofa, 2011).

Dalam hal ini, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penggunaan statistik kriminal agar tidak menyesatkan, diantaranya: (1) menghindari pernyataan total kejahatan sebagai tolok ukur tingkat kriminalitas; (2) dalam mengukur kriminalitas akan lebih baik dikelompokkan menurut klasifikasi kejahatan yang masing-masing klasifikasi mempunyai kesamaan ciri; (3) fluktuasi kejahatan harus diperhitungkan dengan fluktuasi populasi penduduk (*crime rate*), dan; (4) dalam mengukur fluktuasi kejahatan “polisi” sering mempergunakan “angka indeks kejahatan” dan angka indeks kejahatan inilah yang digunakan sebagai tolok ukur fluktuasi kejahatan (Mustofa, 2011).

Pembahasan dalam bab ini akan menyoroti perihal trend kejahatan dalam statistik kriminal resmi kepolisian di Kepolisian Daerah Lampung pada Tahun 2010-2015. Lebih lanjut, juga dilakukan analisis untuk melihat hubungan antara trend kejahatan dengan faktor demografi wilayah Provinsi Lampung. Dalam hal ini, faktor demografi yang dimaksud ditekankan pada variabel jumlah populasi penduduk di tahun tersebut, yakni angka pertumbuhan jumlah penduduk di Bandar Lampung dalam jangka waktu tahun 2010-2015. Sebagai gambaran awal, pada Tabel 5.1 disajikan sebaran jenis kasus laporan kejahatan berdasarkan tahun kejadian (2010-2015) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Provinsi Lampung.

Tabel 5.1.
Jenis Kasus Laporan Kejahatan Berdasarkan Tahun Kejadian (2010-2015)
di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung

No	Jenis Kejahatan	Tahun Kejadian					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pembunuhan	7	3	3	2	13	28
2	Penganiayaan Berat	142	107	94	91	99	533
3	Pencurian Berat	482	486	625	694	631	2918
4	Pencurian Keras	78	104	125	174	110	591
5	Pencurian Ranmor	579	522	586	582	443	2712
6	Kej. Ketertiban Umum	83	104	95	80	112	474
7	Perjudian	62	169	122	55	43	451
8	Pemerasan/Rampas	59	9	114	20	8	210
9	Perkosaan	30	22	15	16	18	101
10	Penipuan	277	244	238	337	486	1582
Jumlah		1799	1770	2017	2051	1963	9600

Sumber: Format GK 56 Jenis Kasus Tahun 2010-2015 Reskrim Polda Lampung dan Jajaran, 2015

5.1. Trend Kejahatan dalam Statistik Kriminal Resmi Kepolisian Daerah Lampung pada Tahun 2010-2015

Dalam analisis ini, trend kejahatan diarahkan pada kecenderungan pertumbuhan dan penurunan angka kejahatan yang didasari pada data statistik kriminal resmi Kepolisian Daerah Lampung periode tahun 2010-2015. Untuk mengukur trend kejahatan digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Larry Siegel, yaitu dengan mengetahui angka perimbangan kejahatan atau *Crime rate*,

yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau nilai rata-rata kejahatan per 10.000 penduduk (Siegel, 2012).

$$Crime Rate = \frac{Angka\ kejahatan\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ total\ penduduk} \times 10.000$$

Secara keseluruhan, untuk mengetahui *Total Crime Rate* dilakukan perhitungan sebagai berikut, yakni *Crime Total* dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dikalikan per 10.000 penduduk. Secara rinci *Total Crime Rate* tahun 2010-2015 di Wilayah Provinsi Lampung dapat diamati pada Tabel 5.2 berikut.

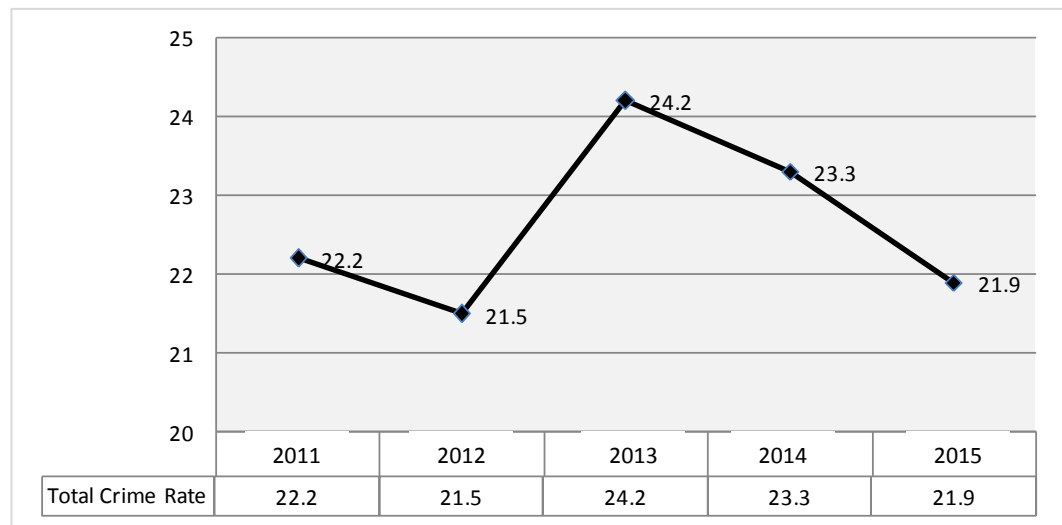
Tabel 5.2.
***Total Crime Rate* Tahun 2010-2015 di Wilayah Provinsi Lampung**

Tahun	<i>Total Crime rate</i>
2011	$\frac{1.799}{7126478} \times 10.000 = 22,2$
2012	$\frac{1.770}{7322768} \times 10.000 = 21,5$
2013	$\frac{2.017}{7767312} \times 10.000 = 24,2$
2014	$\frac{2.051}{7981801} \times 10.000 = 23,3$
2015	$\frac{1.963}{8145622} \times 10.000 = 21,9$

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa secara umum *total crime rate* tahun 2010-2015 di wilayah Provinsi Lampung mengalami fluktuasi naik dan turun. Nilai puncak *total crime rate* berada di tahun 2013, yakni sebesar 24,2. Kemudian disusul di tahun 2010 (23,3) dan di tahun 2011 (22,2).

Gambar 5.1.
Total Crime Rate Tahun 2010-2015 di Wilayah Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

5.1.1. Trend Kejahatan Pembunuhan

Trend kejahatan pembunuhan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.3.
Trend Kejahatan Pembunuhan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	Crime rate
2011	7	7126478	0,09
2012	3	7322768	0,04
2013	3	7767312	0,04
2014	2	1981801	0,02
2015	13	8145622	0,14

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan pembunuhan dalam statistik kriminal Polda Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi naik turun. Sebagai gambaran, *crime rate* di tahun 2011 sebesar 0,09 sedang pada tahun 2012 turun menjadi 0,04, sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,32 persen dari tahun sebelumnya. Bila

diperhatikan, terjadi penurunan *crime rate* di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yakni 0,09 menjadi 0,04. Trend yang serupa juga terjadi pada rentang waktu 2013 sampai dengan 2010, dari 0,04 di tahun 2013 menjadi 0,02 di tahun 2010. Namun demikian, terjadi peningkatan yang signifikan *crime rate* di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yakni 0,02 menjadi 0,14. Secara keseluruhan, walaupun jumlah pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata 2,55 persen, tetapi trend kejahatan pembunuhan dapat dikatakan tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

5.1.2. Trend Kejahatan Penganiayaan dengan Pemberatan

Trend kejahatan penganiayaan dengan pemberatan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4.
Trend Kejahatan Penganiayaan dengan Pemberatan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	142	7126478	1,75
2012	107	7322768	1,30
2013	94	7767312	1,13
2014	91	1981801	1,03
2015	99	8145622	1,10

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan penganiayaan dengan pemberatan dalam statistik kriminal Polda Lampung. Hampir secara keseluruhan terjadi trend penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2010. Menarik untuk diamati trend penurunan di tahun 2011 hingga tahun 2006, penurunan terjadi sebesar 0,45 atau dari 142 kasus (pada tahun 2011) menjadi 107 kasus (pada tahun 2006). Namun demikian, terjadi sedikit peningkatan *crime rate* pada tahun 2011 yang mencapai 6,8 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 1,03 di tahun 2010 menjadi 1,10 di tahun 2011.

5.1.3. Trend Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan

Trend kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 5.5.
Trend Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	482	7126478	5,93
2012	486	7322768	5,91
2013	625	7767312	7,50
2014	694	1981801	7,87
2015	631	8145622	7,03

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam statistik kriminal Polda Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0.02 atau dari 482 kasus meningkat menjadi 486 kasus. Peningkatan *crime rate* yang cukup signifikan terjadi pada rentang periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Peningkatan *crime rate* pada periode tersebut mencapai lebih dari 26 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 5,91 di tahun 2012 menjadi 7,50 di tahun 2013. Trend peningkatan *crime rate* juga terjadi di tahun 2010. Namun demikian, terjadi penurunan *crime rate* di tahun 2011 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.4. Trend Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Trend kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6.
Trend Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	78	7126478	0,96
2012	104	7322768	1,26
2013	125	7767312	1,50
2014	174	1981801	1,97
2015	110	8145622	1,23

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam statistik kriminal Polda Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan *crime rate* yang cukup signifikan terjadi pada rentang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan juga periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2010. Peningkatan *crime rate* pada kedua periode tersebut mencapai lebih dari 31 persen dari tahun sebelumnya, yakni (1) dari 0,96 di tahun 2011 menjadi 1,26 di tahun 2012; (2) dari 1.50 di tahun 2013 menjadi 1,97 di tahun 2010. Namun demikian, terjadi penurunan *crime rate* di tahun 2011 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1.5. Trend Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Trend kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.7 di bawah ini.

Tabel 5.7.
Trend Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	579	7126478	7,13
2012	522	7322768	6,34
2013	586	7767312	7,03
2014	582	1981801	6,60
2015	443	8145622	4,94

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam statistik kriminal Polda Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi. Sebagai gambaran, *crime rate* di tahun 2011 sebesar 7,13 sedang pada tahun 2012 turun menjadi 6,34. Adapun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan, yakni dari 6,34 pada tahun 2012 menjadi 7,03 pada tahun 2013. Adapun untuk periode tahun berikutnya, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2011, terjadi penurunan secara bertahap. Namun demikian, bila diamati dari tabel di atas, kejahatan pencurian kendaraan bermotor memiliki *crime rate* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya.

5.1.6. Trend Kejahatan Ketertiban Umum

Trend kejahatan ketertiban umum dalam statistik kriminal Polda Lampung tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi naik dan turun. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 5.8, dari tahun 2011 hingga tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 0,24 atau dari 83 kasus di tahun 2011 menjadi 104 kasus di tahun 2012. Bila diamati kecenderungan penurunan *crime rate* terus terjadi hingga tahun 2010. Adapun untuk tahun 2011, kembali terjadi peningkatan *crime rate* hingga 1,25 atau terjadi sebanyak 112 kasus.

Secara rinci, trend kejahatan ketertiban umum dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, dapat dilihat dalam Tabel 5.8 di bawah ini.

Tabel 5.8.
Trend Kejahatan Ketertiban Umum
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	83	7126478	1,02
2012	104	7322768	1,26
2013	95	7767312	1,14
2014	80	1981801	0,91
2015	112	8145622	1,25

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

5.1.7. Trend Kejahatan Perjudian

Trend kejahatan perjudian dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.9 di bawah ini.

Tabel 5.9.
Trend Kejahatan Perjudian
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	62	7126478	0,76
2012	169	7322768	2,05
2013	122	7767312	1,46
2014	55	1981801	0,62
2015	43	8145622	0,48

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Pada Tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan perjudian dalam statistik kriminal Polda Lampung di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan *crime rate* yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2011 terdapat 62 kasus dengan angka *crime rate* yang ditunjukkan sebesar 0,76, maka di tahun 2012 melonjak sampai 169 kasus (angka *crime rate* sebesar 2,05).

Meskipun demikian, di tahun-tahun berikutnya, trend penurunan *crime rate* secara bertahap terus berkurang.

5.1.8. Trend Kejahatan Pemerasan/Perampasan

Trend kejahatan pemerasan/perampasan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.10 di bawah ini.

Tabel 5.10.
Trend Kejahatan Pemerasan/Perampasan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	<i>Crime rate</i>
2011	59	7126478	0,73
2012	9	7322768	0,11
2013	114	7767312	1,37
2014	20	1981801	0,23
2015	8	8145622	0,09

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.10 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan pemerasan/perampasan dalam statistik kriminal Polda Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,62 atau dari 59 kasus menjadi hanya sembilan kasus. Namun demikian, peningkatan *crime rate* yang signifikan terjadi pada tahun 2011 yakni 1,37. Bila ditilik lebih lanjut, terjadi penurunan *crime rate* pada rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.

5.1.9. Trend Kejahatan Perkosaan

Trend kejahatan perkosaan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, disajikan dalam Tabel 5.11 di bawah ini.

Tabel 5.11.
Trend Kejahatan Perkosaan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	Crime rate
2011	30	7126478	0,37
2012	22	7322768	0,27
2013	15	7767312	0,18
2014	16	1981801	0,18
2015	18	8145622	0,20

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Tabel 5.11 di atas menunjukkan bahwa trend kejahatan perkosaan dalam statistik kriminal Polda Lampung dari tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,10 atau dari 30 kasus turun menjadi 22 kasus. Trend yang hampir serupa juga terjadi di tahun berikutnya yakni tahun 2013. Hanya saja, terjadi peningkatan yang relatif kecil di tahun 2011, peningkatan *crime rate* tersebut mencapai lebih dari 11 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 0,18 (16 kasus) di tahun 2010 menjadi 0,20 (18 kasus) di tahun 2011.

5.1.10. Trend Kejahatan Penipuan

Trend kejahatan penipuan dalam statistik kriminal Polda Lampung tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi naik dan turun. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 5.12, dari tahun 2011 hingga tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0,44 atau dari 277 kasus di tahun 2011 menjadi 244 kasus di tahun 2012. Bila diamati kecenderungan penurunan *crime rate* juga terjadi pada tahun 2012. Adapun untuk tahun 2010, kembali terjadi peningkatan *crime rate* hingga 3,82 atau terjadi sebanyak 337 kasus. Trend yang serupa juga terjadi di tahun 2011 yang meningkat hingga 5,14 atau terjadi sebanyak 486 kasus.

Secara rinci, trend kejahatan penipuan dalam statistik kriminal resmi Polda Lampung tahun 2010-2015 bila dikaitkan dengan jumlah populasi penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2015, dapat dilihat dalam Tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5.12.
Trend Kejahatan Penipuan
di Polda Lampung Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penduduk	Crime rate
2011	277	7126478	3,41
2012	244	7322768	2,97
2013	238	7767312	2,86
2014	337	1981801	3,82
2015	486	8145622	5,41

Sumber: Olahan data sekunder, 2018

5.2. Pembahasan

5.2.1. Analisis Pertumbuhan Jumlah Penduduk serta Hubungannya dengan Trend Kejahatan

Kriminalitas atau kejahatan dapat timbul karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, demikian penjelasan Donald R. Cressey. Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu bahwa terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial tempat kejahatan tersebut terjadi (Abdulsyani, 1987). Tinggi-rendahnya angka kejahatan mempunyai hubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial; artinya kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat, yaitu antara lain:

1. Mobilitas penduduk,
2. Persaingan dan pertentangan kebudayaan,
3. Ideologi politik,
4. Ekonomi,
5. Kuantitas penduduk,
6. Agama, dan
7. Pendapatan dan pekerjaan.

Terkait dengan hal tersebut, pembahasan selanjutnya akan dititiktekan dengan dilakukannya analisis hubungan antara perkembangan jumlah penduduk dengan trend kejahatan dalam rentang waktu 2010-2015. Dalam mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang lampau, Wilkins memberikan sebuah contoh yang sangat baik tentang cara menganalisa variabel-variabel yang telah lampau tersebut (Wilkins dalam Siegel, 2012). Dia mengemukakan sebuah teknik untuk mengukur assosiasi antara dua variabel. Teknik yang digunakan tersebut adalah berupa Gambar dengan membagi dua variabel mendekati skala waktu yang sama. Namun yang menjadi kendalanya dalam metode ini adalah terkadang angka-angka dari satu variabel tidak sama. Ada yang sangat banyak sementara lainnya sedikit.

Lebih lanjut, Wilkins mengemukakan teknik lainnya: yaitu dengan menghitung rata-rata setiap variabel, serta mengemukakan nilai-nilai tiap tahunnya sebagai presentase dari rata-rata itu. Metode Wilkins inilah yang kemudian akan disajikan dalam menggambarkan trend kejahatan di Provinsi Lampung, dengan memperhatikan faktor demografi.

Dapat dijelaskan bahwa dalam mencari *score* penduduk pada tahun tertentu, nilai rata-rata penduduk selama lima tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu dan dikalikan 100 persen. Sedang untuk mencari score kejahatan yang dilaporkan, nilai rata-rata kejahatan yang dilaporkan dibagi dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun tertentu. Secara rinci dapat diperhatikan pada Tabel 5.13.

Peningkatan trend kejahatan, tidak bisa dipisahkan dengan faktor peningkatan jumlah penduduk, hal ini terjadi karena semakin bertambah jumlah penduduk, maka akan semakin keras persaingan diantara masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jika diamati, semakin bertambah penduduk, maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan akan semakin ketat.

Tabel 5.13.
Persentase *Score* Penduduk dengan *Score* Trend Kejahatan
yang Dilaporkan Tahun 2010-2015 di Polda Lampung

Tahun	Score Penduduk	Score Kejahatan yang Dilaporkan	Keterangan
2011	$\frac{812.133}{849.583} \times 100\% = 95,6$	$\frac{1.799}{1.920} \times 100\% = 93,7$	\bar{X} Penduduk $= \frac{4.247.916}{5}$ $= 849.583$ \bar{X} Kejahatan yang dilaporkan $= \frac{9.600}{5}$ $= 1.920$
2012	$\frac{822.880}{849.583} \times 100\% = 96,9$	$\frac{1.770}{1.920} \times 100\% = 92,2$	
2013	$\frac{833.517}{849.583} \times 100\% = 98,1$	$\frac{2.017}{1.920} \times 100\% = 105,1$	
2014	$\frac{881.801}{849.583} \times 100\% = 103,8$	$\frac{2.051}{1.920} \times 100\% = 106,8$	
2015	$\frac{897.585^{*)}}{849.583} \times 100\% = 105,7$	$\frac{1.963}{1.920} \times 100\% = 102,2$	

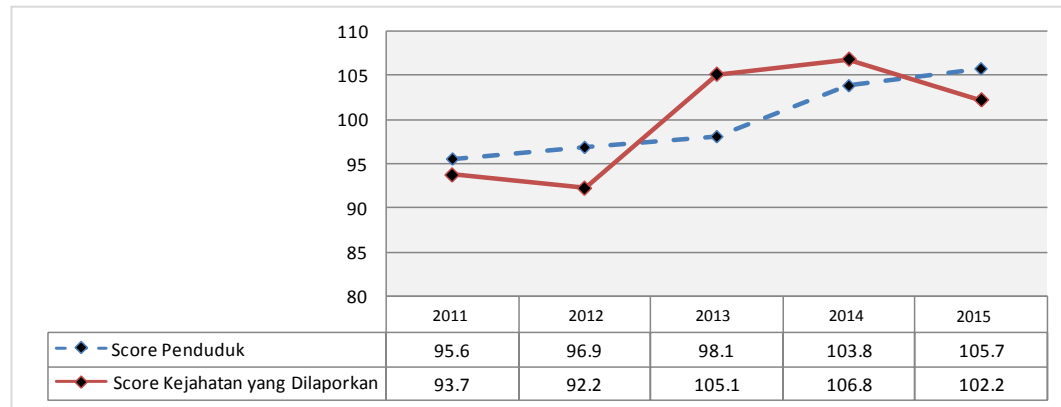
Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Realitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari semakin bertambahnya jumlah penduduk. Pada Tabel 5.13 di atas memperlihatkan kecenderungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan di Provinsi Lampung. Jumlah penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2012 meningkat 1,32 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk kembali meningkat 1,19 persen, di tahun 2014 peningkatan penduduk melonjak menjadi 5,79 persen, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 1,79 persen. Dengan demikian, rata-rata peningkatan dari tahun 2010-2015 sebesar 2,55 persen pertahunnya.

Adapun total jumlah kejahatan yang dilaporkan pada Polda Lampung di tahun 2011 (untuk sepuluh jenis kejahatan) ada sebanyak 1.799 laporan. Terjadi sedikit penurunan pada tahun 2012 sebesar 1,6 persen (1770 laporan) dari tahun sebelumnya. Adapun di tahun 2013 terjadi peningkatan 13,9 persen (2017 laporan). Kecenderungan peningkatan jumlah laporan juga terjadi di tahun 2014 yakni sebanyak 2051 laporan. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi kecenderungan penurunan jumlah kejahatan yang dilaporkan, yakni 1963 laporan. Secara rinci, kecenderungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka

kejahatan di Jakarta Utara dapat diamati pada Gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2.
Score Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Score Kejahatan yang Dilaporkan di Polda Lampung Tahun 2010-2015



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Gambar 5.2 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 laju pertumbuhan jumlah penduduk meningkat secara perlahan. Sementara bila dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan, terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 angka kejahatan yang dilaporkan melonjak cukup signifikan. Kemudian menunjukkan trend yang menurun pada tahun 2015.

Melihat kecenderungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan ternyata mempunyai hubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi sosial. Hal ini berarti kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kuantitas penduduk (Abdulsyani, 1987).

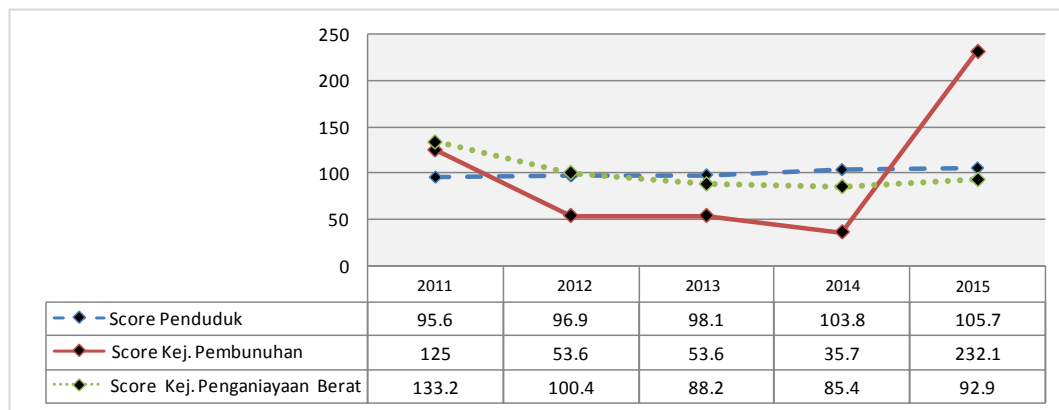
Lebih lanjut, kondisi sosial yang tidak stabil dapat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak kondusif. Masyarakat akan mudah marah, frustrasi, dan akhirnya sangat mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, baik aturan yang sifatnya formal maupun yang non-formal. kondisi yang demikian dikategorikan oleh Durkheim sebagai kondisi anomi. Durkheim mempergunakan konsep anomi sebagai *a condition of deregulation* yang terjadi di dalam masyarakat. Keadaan tersebut sering di artikan sebagai

keadaan tanpa norma. Pada akhirnya keadaan ini sangat mempermudah untuk terjadinya penyimpangan tingkah laku di dalam masyarakat.

5.2.2. Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berat

Pada 5.3 disajikan gambaran visualisasi tentang *score* penduduk dengan *score* trend kejahatan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dilaporkan pada tahun 2010-2015 di Polda Lampung.

Gambar 5.3.
Score Penduduk dengan Score Trend Kejahatan Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang dilaporkan Tahun 2010-2015 di Polresta Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

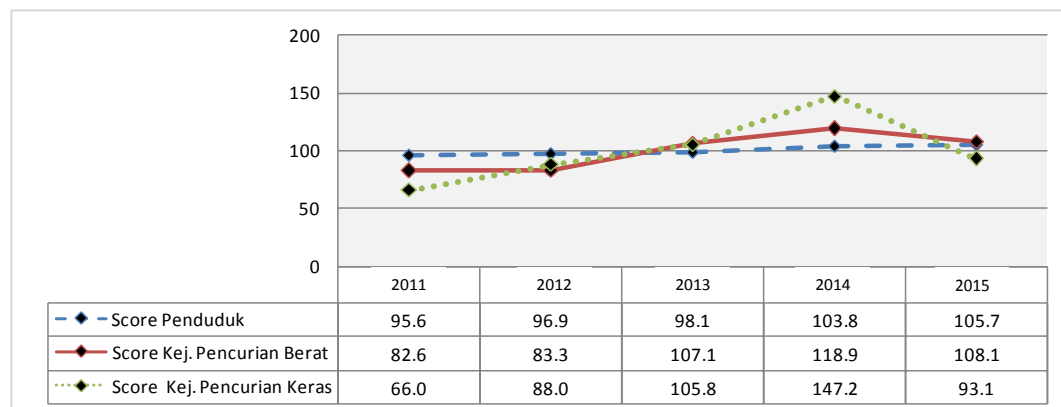
Visualisasi Gambar 5.3 tersebut menunjukkan gambaran relatif adanya hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sementara *score* penduduk menunjukkan peningkatan secara bertahap, namun untuk *score* kejahatan pembunuhan dan penganiayaan berat mengalami fluktuasi naik dan turun. Gambaran yang relatif mencolok ditampilkan untuk *score* kejahatan pembunuhan pada tahun 2015, dimana pada periode tahun tersebut terjadi 13 kasus pembunuhan atau *score*-nya mencapai angka 232,1. Angka *score* tersebut sangatlah melonjak tajam bila dibandingkan satu tahun sebelumnya yang hanya terjadi dua kasus atau *score*-nya hanya 35,7. Secara teoritis, kejahatan pembunuhan dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya: (1) dilihat dari beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif

penyebab terjadinya kejahatan ini, dan (2) dilihat aspek pribadi atau keadaan psikologis seseorang (Kusuma, 1984).

5.2.3. Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan

Pada 5.4 disajikan gambaran visualisasi tentang *score* penduduk dengan *score* trend kejahatan pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2010-2015 di Polda Lampung.

Gambar 5.4.
Score Penduduk dengan Score Trend Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian dengan Kekerasan yang dilaporkan Tahun 2010-2015 di Polresta Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

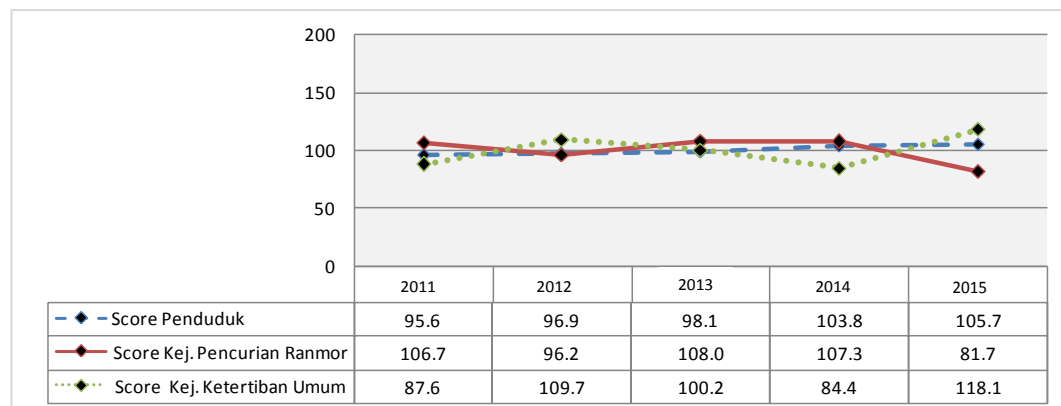
Visualisasi Gambar 5.4 tersebut menunjukkan gambaran relatif adanya hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Untuk jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan, terjadi kecenderungan peningkatan secara bertahap nilai *score*-nya mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Persentase terbesar peningkatan tersebut berada di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, yakni sebesar 28,6 persen. Bila merujuk pada jumlah laporan kasus, pada tahun 2012 terdapat 486 kasus laporan dan meningkat menjadi 625 laporan di tahun 2013. Meskipun demikian, nilai *score* di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 10,8, dari nilai *score* semula di tahun 2014 sebesar 118,9 turun menjadi 108,1 di tahun 2015.

Kecenderungan yang hampir serupa juga terjadi untuk jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan. Nilai *score* secara bertahap naik dari tahun 2011 hingga tahun 2014 dan beranjak turun di tahun 2015. Persentase terbesar peningkatan tersebut berada di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, yakni sebesar 39,2 persen. Jumlah laporan di tahun 2013 berjumlah 125 kasus dan meningkat menjadi 174 kasus pada tahun 2010.

5.2.4. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dan Kejahatan Ketertiban Umum

Pada Gambar 5.5 disajikan gambaran visualisasi tentang *score* penduduk dengan *score* trend kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan kejahatan ketertiban umum yang dilaporkan pada tahun 2010-2015 di Polda Lampung.

Gambar 5.5.
Score Penduduk dengan Score Trend Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dan Kejahatan Ketertiban Umum yang dilaporkan Tahun 2010-2015 di Polresta Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Visualisasi Gambar 5.5 tersebut menunjukkan gambaran relatif adanya hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Fluktuasi naik dan turun nilai *score* cenderung terjadi pada dua jenis kejahatan ini. Sebagai gambaran, untuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor, nilai *score* tertinggi berada di tenggat tahun 2012, yakni sebesar 108. Namun demikian, lonjakan penurunan

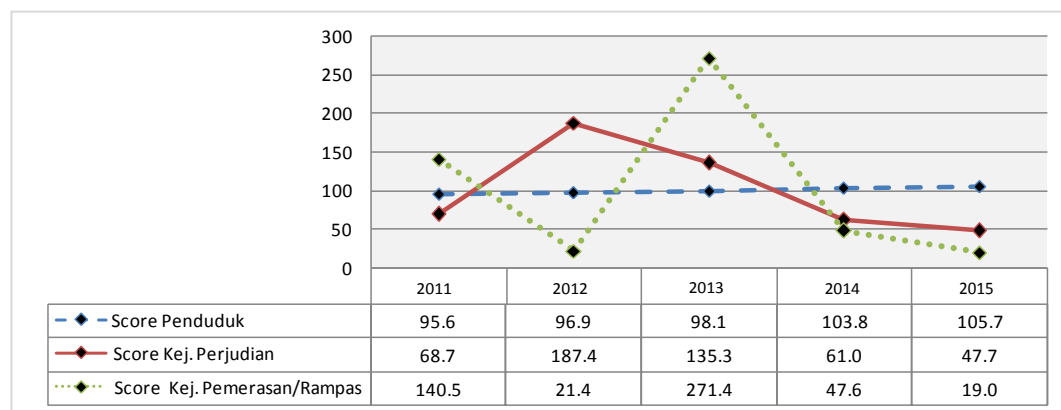
yang cukup drastis terjadi pada tahun 2015, yakni dengan nilai *score* 81,7, adapun untuk tahun 2014 nilai *score*-nya mencapai 107,3.

Pada jenis kejahatan ketertiban umum, nilai *score* tertinggi ada pada tahun 2012, yakni sebesar 109,7. Bila diamati kecenderungan yang terjadi di tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, terdapat perbedaan yang mencolok dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Pada periode tersebut, kejahatan ketertiban umum mengalami peningkatan angka *score* yang cukup berarti, yakni yang semula 84,4 di tahun 2010 naik menjadi 118,1 di tahun 2015.

5.2.5. Kasus Perjudian dan Pemerasan/Perampasan

Pada Gambar 5.6 disajikan gambaran visualisasi tentang *score* penduduk dengan *score* trend kejahatan perjudian dan pemerasan/perampasan yang dilaporkan pada tahun 2010-2015 di Polda Lampung.

Gambar 5.6.
Score Penduduk dengan Score Trend Kejahatan Perjudian dan Pemerasan/Perampasan yang dilaporkan Tahun 2010-2015 di Polresta Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

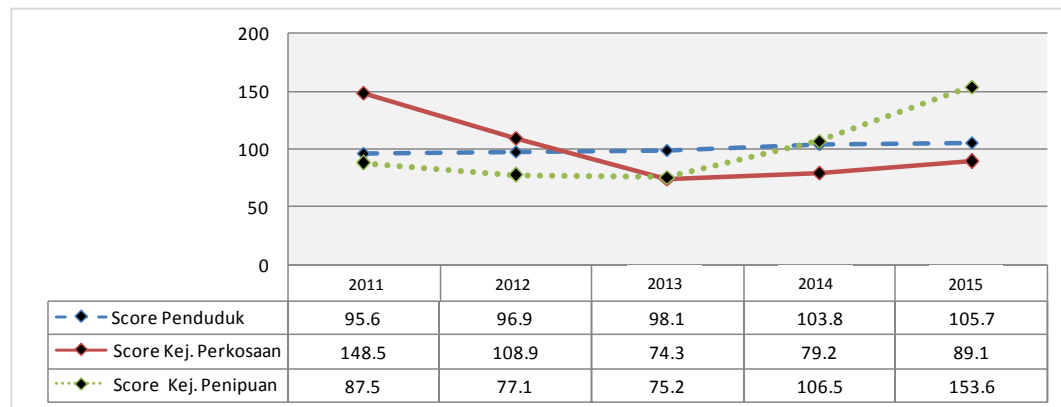
Visualisasi Gambar 5.6 tersebut menunjukkan gambaran relatif adanya hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Menarik untuk dicermati gambaran visualisasi untuk kejahatan perjudian dan pemerasan/perampasan. Sebagai gambaran, untuk kejahatan perjudian di tahun 2011 angka *score*-nya

hanya 68,7 namun di tahun 2012 meningkat tajam hingga angka score-nya mencapai 187,4. Namun di tahun-tahun berikutnya, secara bertahap angka score-nya mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan nilai score untuk kejahatan pemerasan/perampasan. Antara tahun 2011 dengan tahun 2012 terjadi penurunan angka score. Namun di tahun 2013 terjadi peningkatan yang tajam pada angka scorenya hingga mencapai 13 kali lipat. Adapun di tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan yang signifikan.

5.2.6. Kasus Perkosaan dan Penipuan

Pada Gambar 5.7 disajikan gambaran visualisasi tentang *score* penduduk dengan *score* trend kejahatan perkosaan dan penipuan yang dilaporkan pada tahun 2010-2015 di Polda Lampung.

Gambar 5.7.
Score Penduduk dengan Score Trend Kejahatan Perkosaan dan Penipuan yang dilaporkan Tahun 2010-2015 di Polresta Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data sekunder, 2018

Visualisasi Gambar 5.7 tersebut menunjukkan gambaran relatif adanya hubungan antara peningkatan jumlah penduduk dengan naik turunnya angka kejahatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kecenderungan yang hamper serupa terjadi pada dua jenis kejahatan ini. Sebagai gambaran, baik kejahatan perkosaan maupun penipuan mengalami penurunan angka score pada tenggat waktu tahun 2011 hingga 2013, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan angka score. Bila diperhatikan secara seksama, kejahatan

perkosaan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2012, score-nya menjadi 108,9 (22 kasus laporan) dari tahun yang sebelumnya dengan angka score yang mencapai 148,5 (30 kasus laporan).

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara keseluruhan total *crime rate* tahun 2010-2014 di wilayah Provinsi Lampung mengalami fluktuasi naik dan turun. Nilai puncak total *crime rate* berada di tahun 2014, yakni sebesar 24,2. Kemudian disusul di tahun 2015 (23,3) dan di tahun 2010 (22,2).
2. Total jumlah kejahatan yang dilaporkan pada Polda Lampung di tahun 2010 (untuk sepuluh jenis kejahatan) ada sebanyak 1.799 laporan. Terjadi penurunan pada tahun 2011 sebesar 1,6 persen (1.770 laporan) dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2012 terjadi peningkatan 13,9 persen (2017 laporan) dari tahun sebelumnya, di tahun 2014 kembali terjadi peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan yakni sebanyak 2.051 laporan. Namun demikian, di tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 4,2 persen terhadap jumlah kejahatan yang dilaporkan yakni sebanyak 1.963 laporan.
3. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor memiliki *crime rate* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan upaya penciptaan rasa aman di Provinsi Lampung oleh berbagai pihak, baik pihak kepolisian daerah, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait. Sudah menjadi kemestian bahwa ada jaminan rasa aman bagi para warga masyarakat di Provinsi Lampung.
2. Diharapkan ada penelitian kualitatif yang mengangkat permasalahan serupa guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari naik-turunnya trend kejahatan di Provinsi Lampung. Hal ini merujuk pada hasil penelitian kuantitatif ini yang sangat terbatas dalam menggambarkan gejala trend kejahatan di wilayah Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi kriminalitas*. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV Bandung.
- BPS Provinsi Lampung. 2016. *Bandar Lampung dalam angka 2016*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
- BPS Provinsi Lampung. 2016. *Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung 2016*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Hasan, M. Iqbal. 2008. *Pokok-pokok materi statistik 2 (statistik inferensif)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi penelitian kriminologi edisi kedua*. Depok: FISIP-UI Press.
- Priyatno, Duwi. 2009. *5 jam belajar olah data dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siegel, Larry J. 2008. *Criminology (10 edition)*. California: Wadsworth Publishing.
- Trihendradi, C. 2009. *Step By Step SPSS 16 analisis data statistik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan kejahatan dan masalahnya (ditinjau dari segi kriminologi dan sosial)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

SUMBER LAIN

Marzuki, Suparman. *Angka Kejahatan dan politik kriminal*, Tanggal Akses: 14 Agustus 2018. Sumber:[http://pusham.uui.ac.id/upl/article/idAngka %20Kejahatan%20dan%20Politik%20Kriminal.pdf](http://pusham.uui.ac.id/upl/article/idAngka%20Kejahatan%20dan%20Politik%20Kriminal.pdf)